

**PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK DAN BELANJA OPERASI
TERHADAP SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
(Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung)**

Muhammad Iqbal, S.E., M.M.

Nina Mulyani, S.Ak

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSRTACT

This study aims to test hypotheses related to the influence of the variables of Tax Product Shared Fund and Operating Expense to Budget Surplus Financing (SILPA).

This study consists of three (3) variables, Tax Product Shared Fund(X1), and Operating Expense (X2) as independent variables, and Financing Budget Surplus (SILPA) (Y) as the dependent variable. Tax Product Shared Fund is one of revenue derived from the State Budget. Operating expense is one of the shopping areas are used to meet the operational needs of the government. Financing and Budget Surplus (SILPA) is surplus between actual income and expenditure, as well as revenues and expense in the state budget funding / budgets during the reporting period.

The method used in this research is descriptive associative method with a case study approach. Quantitative data used in this study was obtained from the Budget Reports for 5 (five) years from the year 2008 to the year 2012 Statistical tests were used to process data in this research is multiple linear regression.

The results showed that the partial correlation between the Tax Product Shared Fund to Budget Surplus Financing (SILPA) amounted to 0,142 which means it has a very low correlation. While the partial correlation between the Operating Expense to Budget Surplus Financing (SILPA) is 0,501, which means having a relationship that is being. And for simultaneous correlation between the Tax Product Shared Fund and Operating Expense to Budget Surplus Financing (SILPA) is 0,631 which means it has strong relationship. Based on hypothesis testing, there was no significant effect between the Tax Product Shared Fund and the Operating Expense to Budget Surplus Financing (SILPA) either partially or simultaneous. As for the effect of Tax Product Shared Fund and Operating Expense to Budget Surplus Financing (SILPA) is very low at 39.8%, while the remaining 60.2% is influenced by other factors that are not addressed in this study such as revenue (Silpa), Other Expense than Operating Expense, Local Financing, and others.

Keywords : Tax Product Shared Fund, Operating Expense, and Budget Surplus Finacing (SILPA)

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan

pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memberdayakan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk dalam Dana Perimbangan. Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional.

Belanja daerah merupakan pengeluaran oleh bendahara umum atau negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja operasi merupakan salah satu jenis belanja daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan.

Ada fenomena menarik dalam pengelolaan keuangan daerah belakangan ini, yakni seringnya terjadi sisa anggaran (SILPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selisih antara pendapatan disatu pihak dengan belanja dan transfer dilain pihak merupakan surplus atau defisit. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit terjadi apabila pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja dan transfer.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Belanja Operasi Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap SILPA secara parsial di Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Belanja Operasi terhadap SILPA secara parsial di Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi terhadap SILPA secara simultan di Kabupaten Bandung.

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Belanja Operasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Kemudian data tersebut dianalisis dan dihubungkan antara teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan kenyataan praktik yang sebenarnya di lapangan, untuk mendapatkan jawaban dari masalah dalam penelitian ini.

1.2.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap SILPA di Kabupaten Bandung secara parsial.

2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Operasi terhadap SILPA di Kabupaten Bandung secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi terhadap SILPA di Kabupaten Bandung secara simultan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Dana Bagi Hasil Pajak

Pajak diartikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat dengan menyerahkan sebagian kekayaan kas negara menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa serta tidak ada timbal balik secara langsung. Sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi yang berasal dari wajib pajak, yang diperuntukkan bagi keperluan daerah. Wajib dapat diartikan sebagai keharusan dan bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi DBH pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan DBH pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

2.2 Pengertian Belanja Operasi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa :

“Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah.”

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:107) dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah mengatakan bahwa yang termasuk belanja operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai,
2. Belanja Barang,
3. Belanja Bunga,
4. Belanja Subsidi,
5. Belanja Hibah,
6. Belanja Bantuan Sosial,
7. Belanja Bantuan Keuangan.

2.3 Pengertian SILPA

SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran dicatat dalam pos SILPA. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD. Selanjutnya pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan

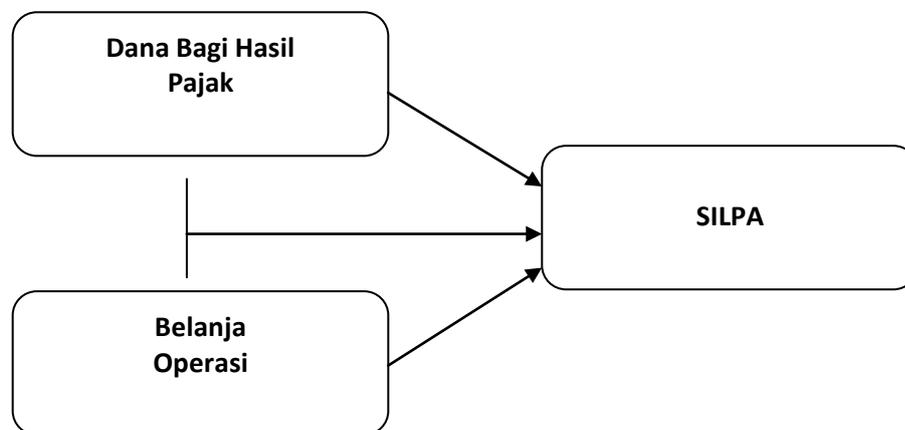
dengan pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi defisit, maka jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Sedangkan SILPA tahun berjalan merupakan selisih antara surplus/defisit APBD dengan pembiayaan neto.

2.3 Kerangka Pemikiran

SILPA dipengaruhi oleh pendapatan dan belanja. Dana Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sedangkan Belanja Operasi merupakan salah satu belanja daerah, sehingga Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal berpengaruh terhadap SILPA.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi sebagai Variabel Bebas dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai Variabel terikat.

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Dari teori dan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat merumuskan Hipotesis sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara parsial.
2. Belanja Operasi berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara parsial.
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara simultan.

3. Objek Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai Dana Bagi Hasil Pajak, Belanja Operasi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan bentuk studi kasus atau format penelitian deskriptif

studi kasus. Dikarenakan dalam penelitian ini tidak memerlukan survei yang meruak ke permukaan, tetapi memfokuskan pada satu unit permasalahan tertentu untuk diteliti.

Data yang akan dianalisis merupakan data hasil studi baik berupa observasi, dokumenter yang telah dilakukan peneliti untuk menganalisis data deskriptif dari masing-masing variabel, sedangkan untuk analisis asosiatif menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda.

Kemudian untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Penetapan tingkat signifikan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 0,05 (5%) karena dinilai cukup mewakili hubungan antara kedua variabel dan merupakan tingkat signifikan yang umum digunakan, terutama dalam penelitian - penelitian ilmu sosial.

4 Hasil Penelitian

4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variable dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah

Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi, sedangkan Variabel dependen adalah SILPA. Maka setelah dianalisis dengan mencari model regresi berganda yang sudah dijelaskan pada bagian metode penelitian, hasil model regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = 50,309 + 0,561 x_1 + 0,078 x_2$$

Keterangan :

1. Konstanta dengan nilai 50,309 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (X_1 dan $X_2 = 0$), maka SILPA adalah 50,309
2. X_1 sebesar 0,561 menunjukkan bahwa setiap kenaikan DBH Pajak sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan SILPA sebesar 0,562 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. X_3 sebesar 0,078 menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja operasi sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan SILPA sebesar 0.078 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.2 Analisis Korelasi

Untuk menghitung keeratan hubungan antara Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), maka didapat nilai r hasil pengujian SPSS sebagai berikut :

1. Untuk korelasi secara parsial antara Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah sebesar 0,142 yang berarti mempunyai hubungan yang sangat rendah.
2. Untuk korelasi secara parsial antara Belanja Operasi terhadap SILPA adalah sebesar 0,501 yang berarti mempunyai hubungan yang sedang.
3. Dan untuk korelasi secara parsial antara Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi terhadap SILPA adalah sebesar 0,631 yang berarti mempunyai hubungan yang kuat.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Uji f

Uji mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan uji F dan uji t. Dari hasil uji F, didapat nilai Fhitung sebesar 0,660 dan Ftabel sebesar 19,00. Karena Fhitung (0,660)<Ftabel (19,00), maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

4.3.2 Uji t

Hasil uji t didapat thitung untuk Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 0,202 dan ttabel sebesar 4,303. Karena thitung (0,202)<ttabel (4,303), maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil Pajak terhadap SILPA. Sedangkan untuk Belanja Operasi didapat thitung sebesar 0,818 dan ttabel sebesar 4,303. Karena thitung (0,818)<ttabel (4,303), maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan Belanja Operasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara parsial.

4.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependendalam bentuk persen (%), adapun hasilnya sebagai berikut :

Dengan nilai R adalah 0,631, maka nilai Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= 0,631 \times 100\% \\ &= 39,8\% \end{aligned}$$

Artinya,SILPA dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi sebesar 39,8%, sedangkan sisanya sebesar 60,2% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-lain Pendapatan yang Sah, Pendapatan Transfer selain Dana Bagi Hasil Pajak, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan Daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengolahan data, korelasi antara Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara parsial adalah sebesar 0,142 yang berarti mempunyai korelasi atau hubungan yang sangat rendah. Berdasarkan uji t, didapat thitung 0,202 dan ttabel 4,303. Karena thitung<ttabel, maka secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang artinya H0 diterima dan Ha ditolak.
2. Sedangkan untuk korelasi antara Belanja Operasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara parsial berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan adalah sebesar 0,501 yang berarti mempunyai korelasi atau hubungan yang sedang. Berdasarkan uji t, didapat t hitung 0,818 dan t tabel 4,303. Karena t hitung < t tabel, maka secara parsial, Belanja Operasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak terdapat pengaruh yang signifikan, yang artinya H0 diterima dan Ha ditolak.

3. Dari hasil pengolahan data, korelasi secara simultan antara Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi terhadap SILPA adalah kuat dan searah, yaitu sebesar 0,631. Sedangkan berdasarkan uji F, didapat Fhitung 0,660 dan Ftabel 19,00. Karena Fhitung < Ftabel, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Artinya H₀ diterima dan H_a ditolak. Adapun nilai koefisien determinasinya adalah sebesar 39,8%, yang berarti pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Operasi terhadap SILPA adalah sebesar 39,8%, dan sisanya yaitu sebesar 60,2% adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, seperti Pendapatan Asli Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Pendapatan Transfer selain Dana Bagi Hasil Pajak, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan Daerah.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam hal pendapatan transfer yang salah satunya Dana Bagi Hasil Pajak, karena merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah daerah harus mampu mengurangi Pendapatan transfer tersebut agar lebih mandiri dalam mendanai kebutuhan daerahnya dan tidak terlalu ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2. Agar pemerintah daerah tidak terlalu tergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus bisa meningkatkan pendapatan daerah yang salah satunya dari penerimaan pajak daerah. Adapun cara untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah salah satunya adalah dengan memperbaiki objek-objek wisata daerah yang berpotensi, sehingga dapat menarik wisatawan dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Selain itu pemerintah juga harus bisa lebih tegas untuk menertibkan hotel dan restoran agar pemasukan yang didapat menjadi lebih meningkat.
3. Pemerintah perlu melakukan kegiatan seperti pendidikan, pelatihan dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala agar kualitas kinerja khususnya kualitas kinerja keuangan semakin baik sehingga berdampak baik pula terhadap kualitas keuangan pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, dan Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Abdul Halim, dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Abuyamin, Oyok. 2013. Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung : Humaniora.
- Djaenuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Djajadiningrat. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
- Erlina, dkk. 2008. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Paragraf 7.

- Halim, Abdul. 2006. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Pipin Syarifin, dan Dedah Jubaedah. 2005. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugianto, Ellen Cristina. 2010. Anggaran Perusahaan. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademik, YKPN.
- Sugiyono. 2009. Statistika Untuk Penelitian. Jakarta : Alfabeta
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta : Alfabeta.
- Suparmono, dan Theresia. 2012. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Jakarta : Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- digilib.unimed.ac.id/pengaruh-dana-bagi-hasil-pajak-dan-dana-bagi-hasil-sumber-daya-alam-terhadap-belanja-modal-pada-kabupaten-kota-di-sumatera-utara-28226.html.
- repository.usu.ac.id/handle/123456789/8895. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal
- www.depkeu.co.id